

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang kuat (Arifin & Mutiara, 2021). Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal (Mafaza & Setyowati, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi berbasis jasa dan industri kreatif (Hastutik et al., 2021). Secara regional, Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan, baik sebelum maupun setelah pandemi, yang berdampak pada berkembangnya berbagai destinasi wisata berbasis komunitas (Yasintha, 2020).

Salah satu bentuk pengembangan wisata berbasis potensi lokal yang menonjol adalah Wisata Lumbung Stroberi yang berada di Desa Pandanrejo dan dikelola oleh BUMDes Raharjo (Pamuji et al., 2023). Kehadiran wisata ini merupakan transformasi dari aktivitas pertanian konvensional menuju model agrowisata yang lebih inovatif dan bernilai tambah (Nirnia et al., 2022). Sebelum adanya pengelolaan berbasis wisata, petani stroberi cenderung menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang fluktuatif dan relatif rendah, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. Namun, melalui pengembangan wisata petik stroberi dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan seperti minuman, selai, dan jenang, nilai ekonomi komoditas stroberi dapat meningkat secara signifikan. Inovasi ini tidak hanya memberikan alternatif sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar dalam sektor pengolahan dan jasa pariwisata (Bria et al., 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adalah badan usaha yang modalnya berasal sepenuhnya atau Sebagian besar dari asset desa yang dipisahkan dan langsung dan

dibentuk unit usaha lainnya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ansori et al., 2022). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah BUMDes di Indonesia telah mencapai lebih dari 60.000 unit, yang menunjukkan peran strategisnya dalam pengembangan ekonomi lokal (Metalia et al., 2023). Dalam konteks ini, BUMDes Raharjo tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan desa yang mengintegrasikan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat.

Penguatan kelembagaan dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, Pemerintah Kota Kota Batu telah menetapkan berbagai regulasi yang mendukung optimalisasi potensi desa melalui kolaborasi antar aktor. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah harus dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha (Prima et al., 2021). Selain itu, kebijakan ini juga mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal dan kearifan budaya sebagai daya tarik unggulan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi secara mandiri melalui pembentukan unit usaha desa. Sinergi antara kebijakan daerah dan nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Lumbung Stroberi oleh BUMDes Raharjo telah berada dalam kerangka regulasi yang mendukung penerapan collaborative governance, di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki ruang untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis komunitas tidak dapat dilakukan secara optimal oleh satu aktor saja. Kompleksitas kebutuhan pengelolaan wisata, mulai dari aspek permodalan, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga inovasi produk, menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak (Windiani et al., 2022). Collaborative governance terjadi karena adanya keterbatasan kapasitas apabila pengelolaan hanya dilakukan oleh BUMDes semata,

baik dari segi sumber daya, pendanaan, maupun akses pasar. Di sisi lain, terdapat potensi besar dari masyarakat lokal sebagai pelaku utama, serta dukungan dari pemerintah desa dan sektor swasta dalam pengembangan fasilitas, promosi, dan jaringan wisata. Ketergantungan antar aktor inilah yang mendorong terbentuknya pola kolaborasi sebagai kebutuhan. Konsep ini menekankan pada keterlibatan aktif berbagai aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara bersama-sama.

Pengelolaan Wisata Lumbung Stroberi oleh BUMDes Raharjo menunjukkan adanya praktik collaborative governance antara berbagai aktor dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Kolaborasi ini tercermin dalam pengembangan produk wisata, penyediaan fasilitas, serta integrasi dengan destinasi wisata lain di Desa Pandanrejo melalui paket wisata terpadu, seperti rafting, tubing, dan outbound (Masturi & Dahruji, n.d.). Selain itu, konsep wisata edukasi yang diterapkan juga memberikan nilai tambah dengan melibatkan pengunjung dalam aktivitas pertanian serta interaksi langsung dengan petani, sehingga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan pengetahuan pengunjung (Maharani & Sulismadi, 2023).

Melalui konsep wisata edukasi, aktivitas pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang mampu menumbuhkan ketertarikan pengunjung terhadap bidang (Diah et al., n.d.). Selain menikmati aktivitas wisata, pengunjung memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan para petani, sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat dan informatif mengenai agrowisata Lumbung Stroberi. Kolaborasi ini tercermin dalam pengembangan produk wisata, penyediaan fasilitas, serta integrasi dengan destinasi wisata lain di Desa Pandanrejo melalui paket wisata terpadu, seperti rafting, tubing, dan outbound (Restu Wardani & Maulana Malik Jamil, 2020).

Terdapat keterlibatan berbagai aktor yang menunjukkan praktik collaborative governance secara nyata dalam pengelolaan wisata lumbung stroberi. Pemerintah Desa Pandanrejo berperan sebagai fasilitator kebijakan sekaligus pendukung program, terutama dalam memberikan legitimasi, arah pengembangan, serta dukungan administratif terhadap kegiatan pariwisata desa. Di sisi lain, BUMDes Raharjo bertindak sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab

dalam operasional wisata, pengembangan usaha, serta pengelolaan sumber daya yang ada agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan wisata ini, khususnya para petani stroberi yang tergabung dalam kurang lebih 10 kelompok tani. Mereka berperan sebagai penyedia utama hasil panen yang menjadi daya tarik utama wisata sekaligus bahan baku produk olahan. Selain itu, terdapat sekitar 13 tenaga kerja atau pengelola aktif yang terlibat langsung dalam operasional wisata, mulai dari pelayanan pengunjung, pengelolaan fasilitas, hingga kegiatan edukasi wisata. Tidak hanya itu, kolaborasi juga melibatkan pelaku wisata lokal yang berperan sebagai mitra dalam pengembangan paket wisata terpadu, seperti kegiatan rafting, outbound, dan aktivitas rekreasi lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang menjadi fondasi dalam pengembangan wisata berbasis komunitas di Desa Pandanrejo, khususnya di wilayah Kota Batu.

Keberadaan Lumbung Stroberi tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat modal sosial masyarakat desa (Alfiansyah, 2021). BUMDes Raharjo mampu menjalankan peran strategis sebagai penggerak ekonomi sekaligus sebagai penguat kohesi sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan wisata (Puspitasari et al., 2021). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, mulai dari produksi, pelayanan, hingga pengelolaan, menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap destinasi tersebut. Selain itu, inovasi yang dilakukan, seperti diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, serta pengembangan paket wisata edukatif, menunjukkan adanya kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar (Endayani et al., 2023).

Terdapat empat jenis aktivitas wisata (4A) yang dapat ditemukan. Pertama Attraction (daya tarik), Lumbung stroberi sebagai daya tarik wisata dengan konsep wisata petik stroberi (Nurrohman et al., 2024). Yang kedua Accessibility (aksesibilitas), yang di mana Desa Pandanrejo berjarak sekitar 4 km dari Kota Batu dan dapat dijangkau dengan mudah melalui jalan utama yang kondusif (Nurwanda & Setiyono, 2021). Selain itu, fasilitas transportasi seperti angkutan desa dan ojek tersedia, serta petunjuk arah yang jelas didukung oleh teknologi navigasi untuk

memudahkan pengunjung menemukan lokasi (Maulina et al., 2022). Fasilitas pendukung seperti area parkir dan pusat informasi wisata juga telah disediakan, sehingga desa ini mudah diakses dan memiliki potensi yang siap dikembangkan (Amiruddin et al., 2024). Ketiga Amenities (fasilitas), Lumbung stroberi memiliki fasilitas pendukung yang meliputi berbagai aktivitas seperti memetik stroberi langsung di kebun, paket wisata, mengunjungi kebun stroberi, dan membeli produk lokal berbasis stroberi seperti selai dan olahan lainnya. Keempat yaitu Ancillary (layanan tambahan), dalam konteks wisata kebun stroberi diwujudkan melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan Wisata Lumbung Stroberi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Tantangan tersebut meliputi ketergantungan pada musim panen yang memengaruhi ketersediaan produk, persaingan dengan destinasi wisata sejenis di Kota Batu, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, dinamika kerja sama antar aktor juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan berbasis kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan keberlanjutan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan potensi petani stroberi di Desa Pandanrejo BUMDes dapat disimpulkan bahwa pengembangan Wisata Lumbung Stroberi berbasis komunitas memerlukan pendekatan collaborative governance yang efektif agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik collaborative governance yang dilakukan oleh BUMDes Raharjo dalam pengembangan Wisata Lumbung Stroberi di Kota Batu, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model tata kelola kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan dalam sektor pariwisata berbasis komunitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Collaborative Governance BUMDes Raharjo dalam pengelolaan Wisata Lambung Stroberi di Desa Pandanrejo?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi BUMDes dalam pengelolaan Wisata Lambung Stroberi di Desa Pandanrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance BUMDes Raharjo dalam pengelolaan Wisata Lambung Stroberi di Desa Pandanrejo.
2. Untuk mengetahui bagaimana BUMDes Raharjo dalam menghadapi permasalahan yang terkait Lambung Stroberi di Desa Pandanrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Dalam hal ini terkait dengan Tata Kelola BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Lambung Stroberi di Desa Pandanrejo.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait tata kelola BUMDes. Bagi PEMDes, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap BUMDes sendiri dalam tata Kelola BUMDes Raharjo. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak terkait tentang tata kelola BUMDes Raharjo. Bagi pihak swasta, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk membiayai program wisata lambung stroberi.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan suatu pemaknaan konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menerapkan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual ada penelitian ini adalah:

1.5.1 Collaborative Governance

Ansell and Gash (2008) mengemukakan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan baru dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk berpartisipasi secara bersama dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama (Muhammad, 2021). Kerjasama kolaboratif diwujudkan melalui penyamaan visi, tujuan, strategi dan kegiatan di antara para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan secara mandiri seerti aotonomi dalam mengelola organisasinya, dengan tetap berpegang pada komitmen dan kesepakatan bersama yang telah disetujui (Dewi, 2019). Collaborative governance menaKnakan dialog tatap muka, keterlibatan aktif pihak-pihak terkait, serta keterbukaan informasi sebagai unsur utama prises kolaborasi yang efektif dan partisipatif. Konsep ini juga berkembang sebagai kritik terhadap pola pengelolaan tradisional yang cenderung hierarkis dan kurang adaptif terhadap keterkaitan lintas sektor.

Dalam kerangka penelitian ini, collaborative governance diposisikan sebagai landasan strategis untuk mengkaji hubungan antar pemangku kepentingan dan mekanisme koordinasi dalam tata kelola destinasi atau program tertentu, seperti pengembangan pariwisata. Konsep ini memungkinkan analisis tidak hanya pada dimensi struktur formal dan proses, tetapi juga pada dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara aktor yang terlibat. Dengan demikian, konsep collaborative governance berfungsi sebagai kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan keputusan yang inklusif, implementasi yang efektif, serta serta keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang.

Bagan 1.1 Proses Kolaborasi Ansell and Gash (2008) dalam pengembangan Wisata Lumbang Stroberi berbasis Komunitas di Kota Batu



Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan gambar bagan diatas tentang proses kolaborasi yang terkait dengan teori Ansell and Gash (2008), proses kolaborasi dalam pengelolaan Wisata Lumbang Stroberi yang dibangun atas empat indikator utama yang saling terhubung dalam suatu siklus berkelanjutan. Keempat indikator tersebut meliputi komunikasi antaraktor, penguatan kepercayaan antaraktor, konsistensi keterlibatan aktor, serta kesepahaman bersama. Model ini menegaskan bahwa kolaborasi tidak berlangsung secara linear, melainkan bergerak secara dinamis dan berulang, di mana setiap unsur saling memengaruhi serta memperkuat satu sama lain dalam satu rangkaian proses. Indikator pertama adalah komunikasi antar aktor yang diwujudkan melalui forum musyawarah dalam pengambilan keputusan serta rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin. Dalam kerangka Ansell and Gash (2008), komunikasi antar aktor diwujudkan melalui dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) yang bersifat terbuka dan partisipatif. Komunikasi menjadi fondasi awal dalam membangun kerja sama karena melalui dialog yang terbuka, para aktor dapat menyampaikan pandangan, kepentingan, dan tanggung jawab masing-masing. Interaksi yang intensif tersebut

memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara timbal balik sehingga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperjelas arah kebijakan yang disepakati bersama.

Indikator kedua adalah pengutan kepercayaan antar aktor, yang dibentuk melalui praktik transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan, serta adanya komitmen kerja sama yang tegas dan konsisten. Transparansi berperan dalam menciptakan akuntabilitas, sedangkan komitmen menunjukkan kesungguhan setiap pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila kedua aspek tersebut berjalan secara konsisten, hubungan antaraktor menjadi lebih kokoh dan potensi konflik dapat diminimalkan. Kepercayaan yang terbangun kemudian menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi. Praktik ini sesuai dengan konsep trust building dalam teori Ansell and Gash (2008), yang menegaskan bahwa kepercayaan dibangun melalui interaksi berulang yang konsisten, keterbukaan informasi, serta komitmen terhadap akuntabilitas

Indikator ketiga yaitu konsistensi keterlibatan aktor, tercermin dari partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan wisata serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Keterlibatan yang berkesinambungan menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga terimplementasi dalam praktik di lapangan. Konsistensi ini turut menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan secara kolektif.

Indikator terakhir adalah pemahaman bersama, yang ditandai dengan keselarasan visi dan misi serta adanya rencana pengembangan wisata yang berorientasi pada keberlanjutan. Pada tahap ini, seluruh aktor memiliki persepsi yang relatif sejalan mengenai tujuan, arah kebijakan, dan manfaat yang hendak dicapai. Pemahaman bersama menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas kerja sama karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan keberlangsungan kolaborasi jangka panjang.

1.5.2 Tourism Development

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan potensi dan kualitas destinasi wisata melalui pemanfaatan sumber daya alam, budidaya, maupun sumber daya

buatan secara optimal, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan (Diwangkara et al., 2020). Pengembangan pariwisata tidak hanya aberorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mncekup Upaya peningkatan kualitas dstinasi, penyediaan sarana dan prasana pendukung, serta penguatas kapasitas kelembagaan dan pengelola destinasi wisata (Muchammad Satrio Wibowo & Belia, 2023). Dalam pelaksanaanya, proses pengembangan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakt, yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanan, dan pengawsan kegiatasn pariwisata secara berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata mencakup berbagai upaya untuk mneicptakan destinasi yang memilikidaya saing tinggi, berkelanjutan, dan mampu memberikan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan (Sari et al., 2022). Upaya tersebut dilakukan melalui pengembanan daya Tarik wsisata, peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas pendukung, serta penguatan sistem tata kelola destinasi. Selain itu, pengembangan pariwisata juga berperan dalam epeningkatan ksejahteraan masyarakt lokal melalui penciptaan peluang kerja, peningkatan pendapatan, serta memberdayaan ekonomi masyarakt berbasis potensi lokal (M. Ismail, 2020). Oleh karen aitu, pengembangan pariwisata perlu dilaksanakan secara terpadu dengan memeprtimbangkan aspek keberlanjutasn ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.6 Definisi Operasioal

Definisi operasional merupakan indikator untuk menunjukkan permasalahan yang sedang dibahas, dengan menggunakan langkah-langkah untuk menemukan kunci dari permasalahan desa wisata. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sesuai dengan teori Ansell and Gash (2008) dalam proses kolaborasi sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengembangan wisata lumbung stroberi
 1. Komunikasi antar aktor dalam pengelolaan wisata
 - a. Perencanaan pengembangan wisata lumbung stroberi

- b. Pelaksanaan musyawarah dalam pengambilan Keputusan dalam pengembangan wisata lumbung stroberi
 2. Penguatan kepercayaan antar aktor dalam pengelolaan wisata
 - a. Transparansi pengelolaan kegiatan dan keuangan dalam pengembangan wisata lumbung stroberi.
 - b. Adanya komitmen kerja sama antar aktor dalam pengembangan wisata lumbung stroberi
 3. Konsistensi keterlibatan aktor dalam pengelolaan wisata
 - a. Partisipasi aktor dalam pelaksanaan kegiatan wisata lumbung stroberi
 - b. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam pengembangan wisata lumbung stroberi
 4. Pemahaman bersama antar aktor dalam pengelolaan wisata
 - a. Visi dan misi dalam pengembangan wisata lumbung stroberi
 - b. Rencana pengembangan wisata berkelanjutan
- B. Tantangan Pengembangan Wisata Lumbung Stroberi Berbasis Komunitas

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian Menurut Creswell (2016) adalah suatu rancangan dan tahapan sistematis yang memuat langkah-langkah, asumsi-asumsi dasar, serta Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah prosedur yang ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan metode tersebut sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis terhadap pengelolaan wisata lumbung stroberi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya terkait proses kolaborasi antara aktor-aktor dalam pengelolaan BUMDes berbasis wisata. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian berfokus pada pertanyaan “bagaimana” proses collaborative governance berlangsung, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai interaksi antar aktor, mekanisme kerja sama, serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas. Penelitian kualitatif

memungkinkan peneliti menggali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintah desa, BUMDes, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan wisata lumbung stroberi.

1.7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi dalam dua hal yakni data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata seperti, Direktur dan pengelola unit usaha pada BUMDes Raharjo, perangkat Desa Pandanrejo, pengelola operasional Wisata Lumbung Stroberi, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung yang relevan dengan objek penelitian. Sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah mengenai collaborative governance dan tata kelola BUMDes, regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan desa dan pariwisata yang tersedia di website resmi Desa Pandanrejo dan data statistik mengenai kondisi demografis, sosial, dan ekonomi masyarakat serta pengembangn sektor pariwisata diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kota Batu. Selain itu, data sekunder juga berperan penting dalam memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh. Dalam konteks collaborative governance, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 43 Tahun 2021 Pasal 4 tentang Badan Usah Milik Desa

4. Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes yang didapat dari Kantor Desa Pandanrejo
5. BPS Kota Batu tentang statistik demografis, sosial dan ekonomi wilayah desa
6. Referensi terkait dengan collaborative governance melalui artikel ilmiah dan website pemerintah

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak, individu, kelompok, atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian dan memberikan informasi atau data yang diperlukan. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur BUMDes
- 2) Sekertaris Desa
- 3) Staff Pengelola Wisata
- 4) Kelompok Tani

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Lumbung Stroberi dan Kantor Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Peneliti melakukan penelitian di Lokasi tersebut agar mendapat informasi dengan jelas terkait Collaborative Governance BUMDes Raharjo dalam Pengelolaan Wisata Lumbung Stroberi yang dikelola oleh BUMDes Pandanrejo.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 teknik untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang konkret sesuai dengan (Sugiyono 2016) yaitu:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui penelusuran arsip dokumen, catatan tertulis, serta material visual berupa laporan pertanggungjawaban dan evaluasi dinas dan pendapat dari para ahli yang peneliti gunakan sebagai pemecah permasalahan dan merumuskan hasil yang lebih konkrit. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

sangat penting dalam penelitian ini karna memberikan akses ke data historis yang sangat membantu penulis karna menghemat waktu dan juga biaya serta mudah untuk di akses. Dengan memanfaatkan dokumentasi penulis berupa, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023,

b. Wawancara

Pengumpulan informasi melalui metode wawancara dilaksanakan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Dalam kajian ini, penulis menerapkan wawancara terstruktur, yaitu teknik percakapan yang dilaksanakan sesuai dengan panduan pertanyaan serta susunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap para aktor yang terlibat dalam pengembangan Wisata Lumbung stroberi, yang meliputi Direktur BUMDes Raharjo, perangkat desa, staff BUMDes, kelompok tani yang berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur untuk mnggali informasi mengenai proses terbentuknya kolaborasi, pembangian peran dan tanggung jawab aktif, mekanisme koordinasi, bentuk komitmen Kerjasama, serta kendala dan Solusi dalam pengelolaan wisata. Data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana proses collaborative governance dalam pengembangan wisata.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi yaitu metode dimana peneliti mengumpulkan dengan cara mengamati secara langsung objek dan fenomena yang sedang di teliti. sebuah. Observasi dilakukan secara langsung dikawasan Wisata Lumbung Stroberu untuk melihat praktik kolaborasi yang berlangsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Peneliti mengamati aktivitas pelayanan wisata, keterlibatan masyarakat sebagai petani maupun pelaku usaha pendukung. Selain itu, teknik observasi ini memvalidasi ulang hasil dari dokumen yang sudah didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara. Observasi merupakan metode yang penting dan efektif untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan mengolah, menafsirkan, dan menyusun data secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, dan mendukung penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Milles dan Huberman (1992) analisis data dilakukan melalui tiga tahapan pokok yang saling berkaitan dan berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga proses tersebut saling berkaitan dan berjalan beriringan selama analisis berlangsung. Penerapan Teknik analisis data meliputi beberapa tahap yang saling terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan sejumlah besar informasi menjadi bentuk yang lebih ringkas dan terfokus. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara menjadi lebih ringkas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempermudah tahapan analisis dan pengumpulan data berikutnya. Reduksi data melibatkan pemilahan, penyederhanaan, dan pengolahan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan alur penelitian tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Pada tahapan ini, data dijelaskan secara deskriptif dan digunakan untuk mendukung proses penarikan kesimpulan. Penyajian data menjadi bagian penting dalam penggunaan metode kualitatif. Proses ini dengan menggunakan berbagai bentuk visualisasi seperti matriks, diagram, grafik, jaringan dan bagan. Seluruh elemen tersebut digunakan untuk menggabungkan informasi sehingga data tersusun dalam format yang lebih mudah dipahami

c. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir yang berfungsi untuk membantu merangkum dan menyampaikan temuan utama dari penelitian. Tahapan

ini juga bertujuan untuk menilai apakah proses reduksi data telah berhasil mencapai tujuan dari penelitian. Penyusunan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan dengan baik dan rinci setiap data yang sudah diperoleh dan dinarasikan menjadi beberapa paragraf untuk dijadikan kesimpulan akhir penelitian. Kesimpulan ini memuat penjelasan mengenai keberhasilan penelitian serta saran dari penulis.

